



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029



**DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SIGI**



<https://dppk.sigikab.go.id>



disperkimkabsigi2023@gmail.com



@disperkimsigi



Jl. Poros Palu-Palolo, KM.15
Desa Sidera, Kec. Sigi Kota

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi periode 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategis arah kebijakan dan program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi periode 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 yang Kemudian akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi.

Kami telah berupaya untuk menyusun dokumen Renstra ini dengan sebaik-baiknya, namun disadari bahwa Renstra yang disusun oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 ini masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, saran serta kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan guna lebih sempurnanya penyusunan dokumen serupa dimasa mendatang.

Akhirnya, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh Tim Penyusun Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi dan seluruh pihak yang membantu dalam proses penyusunan Renstra ini, semoga Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini dapat menjadi bahan evaluasi, utamanya dalam rangka peningkatan kinerja bagi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi.

Sigi, 30 September 2025
Mengetahui
KEPALA DINAS

AMRIN, ST., MT
Nip. 197309222002121003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi	14
2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi	18
2.3 Kelompok Sasaran Layanan	20
2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	20
2.4.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	21
2.4.2 Isu Strategis	22
BAB III	24
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	24
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030.....	24
3.2 Penetapan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030	27
3.3 Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030	29
3.4 Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030	30

BAB IV	33
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PRUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....	33
4.1 Program Pengembangan Perumahan.	33
4.2 Program Kawasan Permukiman.	33
4.3 Program Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh.....	33
4.4 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).....	33
4.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.....	34
BAB V PENUTUP	116

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan ASN & Non ASN	15
Tabel 2. 2	Tabel Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 2. 3	Jumlah personil dari status Pendidikan formal	15
Tabel 2. 4	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan Struktural berdasarkan golongan	16
Tabel 2. 5	Aset Yang Dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi	16
Tabel 2. 6	Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2021-2024	18
Tabel 2. 7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2024	19
Tabel 2. 8	Isu Strategis PD	23
Tabel 3. 1	Sasaran dan Indikator Kinerja	24
Tabel 3. 2	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030	26
Tabel 3. 3	Penetapan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030	28
Tabel 3. 4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030	31
Tabel 4. 1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi tahun 2026-2030	35
Tabel 4. 2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi tahun 2026-2030	79
Tabel 4. 3	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi tahun 2026-2030	111
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi tahun 2026-2030	114
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Konsep Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 1. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi 2023	14

BAB I PENDAHULUAN

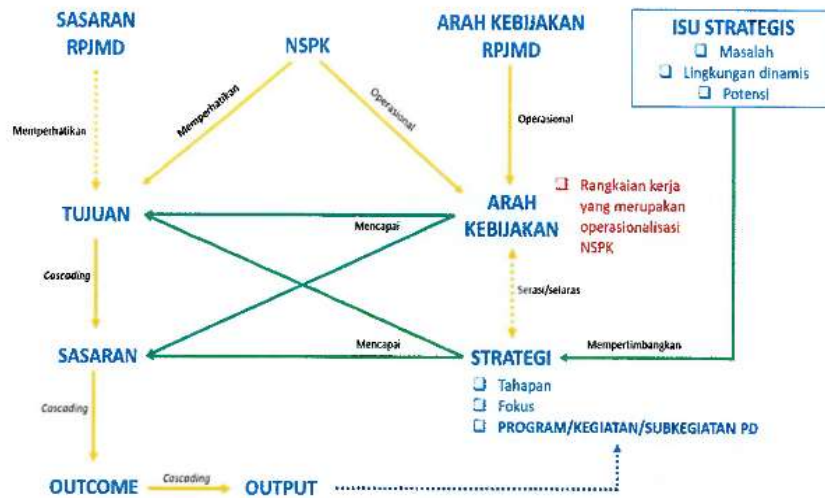
1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi periode 2025–2029 merupakan bagian integral dari upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMEN) Nomor 2 Tahun 2025 yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, guna memastikan kesinambungan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi periode 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) perangkat daerah (PD), yang juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

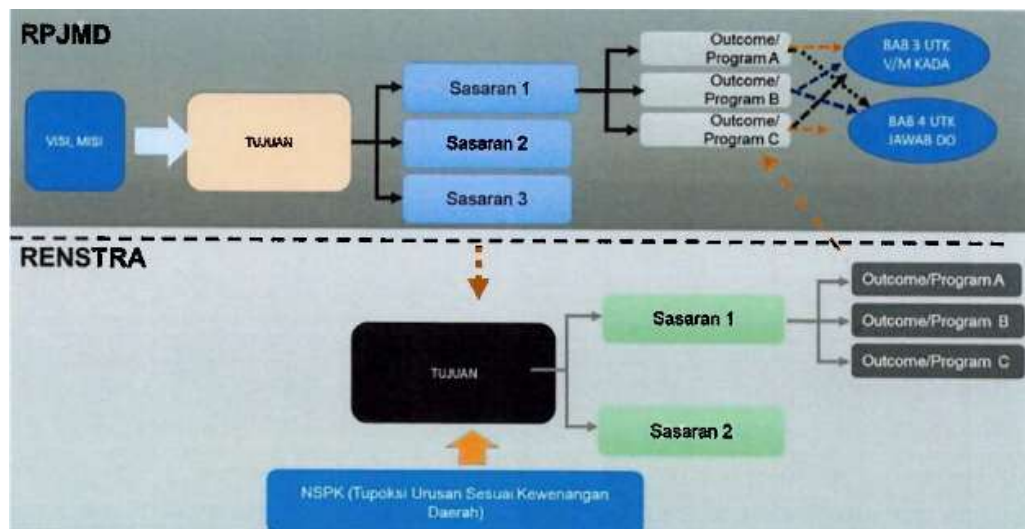
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi saat ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam penyediaan perumahan layak huni dan pengembangan kawasan permukiman. Pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, serta keterbatasan lahan telah mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, yang pada gilirannya menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan ruang, kualitas lingkungan, dan ketahanan pangan daerah. Selain itu, masih terdapat kawasan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, dan keterbatasan akses infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan lingkungan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam beberapa tahun terakhir, program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang dijalankan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi telah memberikan dampak positif, namun masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi lintas sektor menjadi hambatan yang perlu segera diatasi agar program-program strategis dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Tantangan lain yang dihadapi adalah perlunya penyesuaian terhadap perubahan kebijakan daerah, dinamika pembangunan nasional, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Renstra Kementerian/Lembaga terkait di tingkat nasional dan provinsi. Adapun keterkaitan antara tujuan Renstra Perangkat Daerah dengan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada bagan alur berikut:



Gambar 1. 1. Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 1. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Dengan demikian, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi diharapkan mampu menjadi pedoman strategis dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan, guna mewujudkan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan. Penyusunan Renstra ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung

pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Sigi. Melalui dokumen ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan dan penataan kawasan permukiman yang inklusif dan berwawasan lingkungan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 mengacu pada beberapa peraturan dan undang-undang yang menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya di bidang perumahan dan permukiman. Secara umum, dasar hukum tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Bupati Sigi Nomor 34 Tahun 2020 Mengenai Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2016 Tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 34);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 125);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);
30. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
31. INMEN 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

- a. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sigi, khususnya Misi I “Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkeadilan” dan Misi 4 “Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Harmoni Sosial”;
- b. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Sigi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;

1.3.2 Tujuan

- a. Mewujudkan arah kebijakan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Penyusunan Renstra bertujuan memberikan arah strategis pembangunan lima tahunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, agar sejalan dengan visi-misi Kepala Daerah dan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029.
- b. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam strategi operasional dinas. Renstra menjadi dokumen perencanaan strategis untuk

mengoperasionalkan mandat Kepala Daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.

- c. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berfungsi sebagai dasar untuk menyusun perencanaan tahunan yang lebih rinci dan operasional.
- d. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi;
- e. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025- 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten untuk periode 2025–2029, mengacu pada Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa Gambaran kondisi yang mencakup penjelasan mengenai konteks perencanaan pembangunan daerah, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi, serta pentingnya arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah.
2. Dasar Hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029.
4. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029.

BAB II : GAMBAR PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran pelayanan PD yang memuat:
 - a. Tugas, Fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan Tupoksinya; dan

- d. Kelompok sasaran layanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi.
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 yang didasarkan pada Norma, Standar, prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.
2. Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 didasarkan pada Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Sigi.
3. Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 berisi langkah-langkah dan Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.
4. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 berisi rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Serta target kebergasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

BAB V : PENUTUP

Memuat tentang Kesimpulan, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Melalui tugas dan fungsinya, dinas ini bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang berkaitan dengan penyediaan perumahan layak huni, penataan kawasan permukiman, serta peningkatan kualitas lingkungan hunian. Didukung oleh struktur organisasi yang adaptif dan sumber daya yang kompeten, kinerja pelayanan terus ditingkatkan untuk menjangkau kelompok sasaran yang meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, warga di kawasan kumuh, serta komunitas yang membutuhkan intervensi penataan permukiman. Pelayanan yang diberikan diarahkan untuk menciptakan lingkungan hunian yang aman, sehat, tertata, dan berkelanjutan.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah maka Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi mempunyai :

A. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Susunan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Daerah tipe B. Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perumahan;
4. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pertanahan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dari masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang pengelolaan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- c. Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran Dinas;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan;

- e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tataaksana;
- g. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- h. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- i. Pengelolaan data dan informasi;
- j. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, dan umum;
- l. Pelaporan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian dan umum; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan;
- c. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan penyediaan serta pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
- d. Pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- e. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
- f. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- g. Pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
- h. Pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan Gedung (SKBG).
- i. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang perumahan;

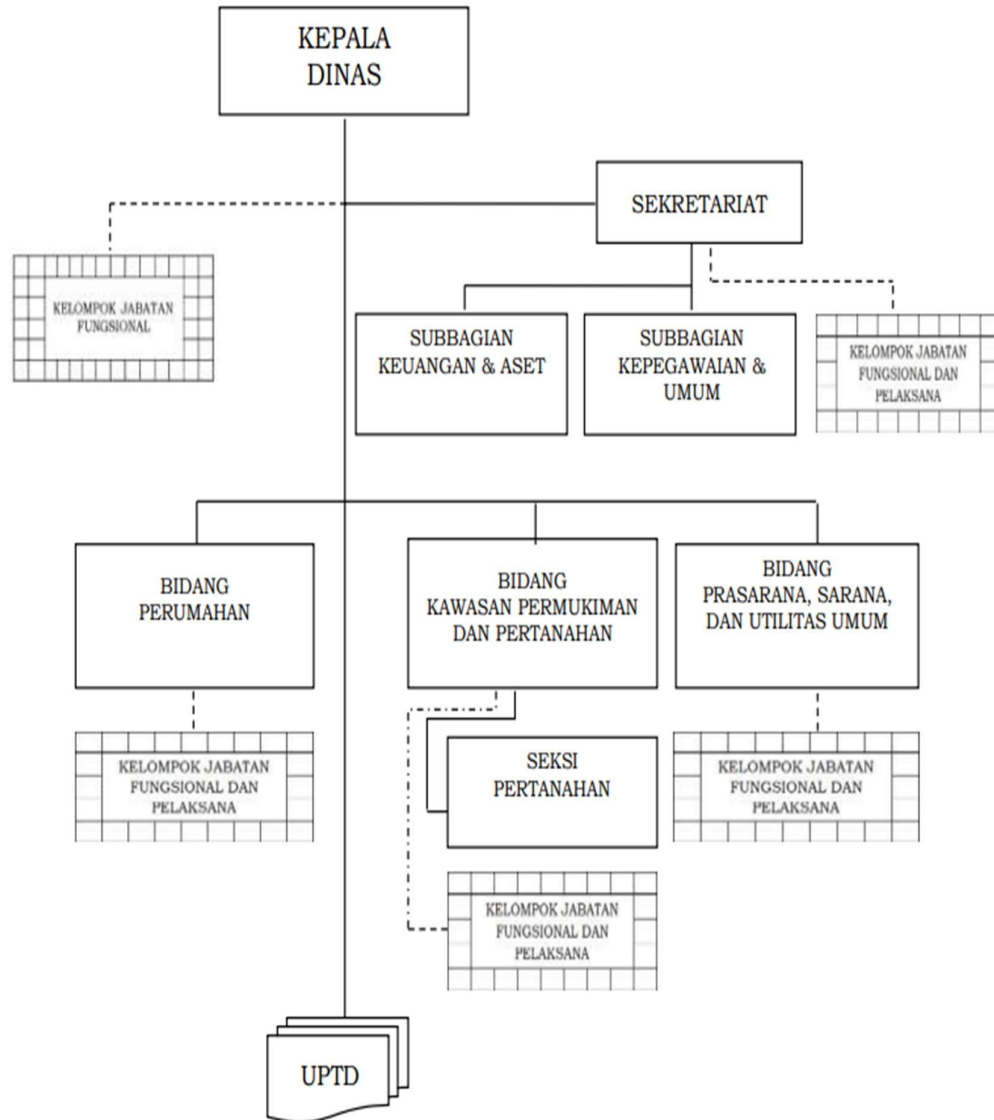
- k. Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan permukiman dan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- d. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. Pengaturan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- f. Pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- g. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
- h. Penyiapan pemberian izin lokasi dalam Daerah, penerbitan izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
- i. Fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
- j. Penyiapan penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah Garapan dalam Daerah, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
- k. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;

- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
 - m. Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan permukiman dan pertanahan; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum
- Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Pelaksanaan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Penyusunan standar dan pedoman prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. Fasilitasi pelaksanaan bantuan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi 2023

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi

Sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan faktor utama sebagai unsur manajemen yang akan menentukan keberhasilan suatu institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi yang dituju dan diharapkan. Untuk melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan perundangan, kekuatan sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan ASN & Non ASN

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan ASN & Non ASN

No	Jabatan	ASN					Non ASN	Jumlah
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. IX		
1	Kepala				1			1
2	Sekretaris				1			1
3	Kabid			3				3
4	Kasubag			2				2
5	Kasubid							0
6	Fungsional			1	1			1
7	Pelaksana/ Administratif		5	11		2		11
8	Tenaga Kontrak						14	14
9	Dst...							0
								0
	Jumlah		5	17	3	2	14	1

2. Tabel Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2. 2 Tabel Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Sederajat					
2	SMA Sederajat	4		2		6
3	D3	1		1	1	3
4	S1	10	9	4	6	29
5	S2	2	1			3
6	S3					

3. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Tabel 2. 3 Jumlah personil dari status Pendidikan formal

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
	PNS:			
1	Golongan I			0
2	Golongan II	5		5
3	Golongan III	9	8	17
4	Golongan IV	2	1	3
	PPPK:			0
1	Golongan IX	1	1	2
2	Dst...			

4. Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan Struktural berdasarkan golongan

Tabel 2. 4 Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan Struktural berdasarkan golongan

No	Jabatan	Golongan					Jumlah
		III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c	
	Struktural:						
1	Kepala				1		1
2	Sekretaris			1			1
3	Kabid		3				3
4	Kasubag	1					1
5	Kasubid						0
	Jumlah	1	3	1	1		6

B. Sumber Daya Aset/Modal

Selain sumber daya manusia, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi juga didukung dengan sarana dan prasarana yang merupakan barang milik (aset) daerah, yang dikuasakan untuk digunakan bagi kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Dikarenakan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dinas yang baru saja dimekarkan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan, maka untuk aset yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagian besar merupakan aset mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan yang saat ini menjadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang. Gedung kantor untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memiliki gedung kantor.

Adapun aset yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Aset Yang Dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Station Wagon	Unit	2		2
2	Sepeda Motor	Unit	11		11
3	Laptop	Unit	10	2	12
4	Meja	Buah	24		24
5	Kursi kaporta	Buah	4	2	6
6	kursi frontline	Buah	3		3
7	Kursi plastik	Buah	9	1	10
8	Kursi besi	Buah	4	1	5
9	lemari 2 pintu	Buah	1		1
10	Print	Buah	4		4

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
11	AC	Buah	7		7
12	lemari 1/2	Buah	1		1
13	Global Positioning System	Unit		2	2
14	Noise & Distortion Meter	Unit		1	1
15	A.C Window	Unit	2		2
16	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1		1

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi selama tahun 2021 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 dibawah ini.

Tabel 2. 6 Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	IKU:	%	80	80,81	81,57	81,74	81,9	84,32	81,53	83,08	83,95	105,4	100,9	101,9	102,7
	IKK:														
	Indikator program renstra lalu:														
	SPM:														
	Indikator lainnya terkait Tusi														

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					12.923.180.330	14.676.767.587	15.208.000	4.353.862.020	0	0	0	0
2	Program Pengembangan Perumahan	1.754.572.000	152.775.000	152.775.000	152.927.775	7683128000	375000000	550.000.000	2.118.753.333	22,8	40,7	27,8	7,2
3	Program Kawasan Permukiman		6.554.656.000	6.358.016.320	6.358.016.320	2856737496	3.552.709.000	349.109.000	5.631.650.400	0	184,5	1821,2	112,9
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum			250.000.000	250.000.000				3.275.610.500				7,6
5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.			250.000.000	250.000.000			3939040000				6,3	

Dari tabel 2.5 dan table 2.6, dapat dilihat bahwa dari hasil evaluasi terhadap rasio capaian serta rasio antara realisasi dan anggaran, terlihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi termasuk kategori baik sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sumber dana berasal dari DAK Penugasan, DID, dan DIF. kinerja yang telah cukup baik tersebut sangat perlu ditingkatkan, khususnya jika memperhatikan tingkat penyerapan anggaran belanja langsung yang kurang stabil. Oleh karena itu, kebijakan untuk mewujudkan ketepatan bahkan percepatan dalam penyerapan anggaran perlu disempurnakan.

Demikian pula kebijakan terkait tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta juga penguatan kapasitas SDM, baik SDM di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan SDM penyedia jasa konstruksi.

2.3 Kelompok Sasaran Layanan

Adapun kelompok sasaran layanan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

- a. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membutuhkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau;
- b. Masyarakat terdampak bencana yang memerlukan bantuan pemulihan hunian dan penataan permukiman pascabencana;
- c. Rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH) yang memerlukan peningkatan kualitas tempat tinggal; serta
- d. Komunitas yang berada di kawasan permukiman dengan kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang belum memadai atau rusak, yang membutuhkan perbaikan dan penyediaan infrastruktur dasar lingkungan secara terpadu.

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dihadapkan pada berbagai permasalahan dan isu strategis yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan layanan public di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.4.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah dan kapasitas ASN serta tenaga profesional yang memahami persoalan teknis perumahan, kawasan permukiman, dan PSU masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan di lapangan belum maksimal.

b. Kemampuan Fiskal Daerah yang Rendah

Keterbatasan anggaran menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan program strategis seperti pengembangan perumahan, penataan kawasan kumuh, dan pembangunan infrastruktur dasar permukiman, terutama di desa tertinggal dan sangat tertinggal.

c. Perubahan Regulasi yang Tidak Terprediksi

Dinamika kebijakan dan regulasi pusat yang cepat sering kali menyulitkan penyesuaian di daerah.

d. Koordinasi Lintas Sektor yang Lemah

Lemahnya koordinasi antarinstansi terkait berdampak pada sulitnya integrasi data dan sinkronisasi program, terutama dalam pengukuran kinerja serta penyusunan perencanaan yang tepat sasaran.

e. Status dan Ketersediaan Lahan yang Bermasalah

Masih banyak lahan yang status hukumnya tidak jelas, sehingga menghambat pembangunan perumahan dan permukiman. Di sisi lain, luas lahan yang tersedia semakin terbatas, sementara harga tanah dan material bangunan terus meningkat.

f. Kualitas dan Pengelolaan PSU yang Belum Optimal

Masih banyak PSU (jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi) yang dibangun tidak sesuai standar, bahkan ada yang belum diselesaikan atau tidak direalisasikan oleh pengembang. Beberapa PSU juga terbengkalai karena ketidakjelasan kewenangan pengelolaan, serta adanya konflik pemanfaatan dengan masyarakat.

g. Kerusakan Akibat Bencana Alam

Perumahan yang telah dibangun sering kali mengalami kerusakan akibat bencana seperti banjir dan longsor, yang mengganggu pencapaian target pembangunan, khususnya di daerah rawan dan pelosok.

h. Data Teknis yang Kurang Memadai

Data terkait pertanahan, kondisi perumahan, dan cakupan layanan PSU masih belum lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program.

2.4.2 Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, identifikasi isu strategis menjadi langkah penting bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi. Isu strategis merupakan tantangan utama yang memerlukan perhatian khusus karena berdampak besar terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan hunian layak, penataan permukiman, serta pengentasan kawasan kumuh.

Penetapan isu strategis ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah yang menjadi kewenangan dinas, permasalahan yang ada di lapangan, serta hasil identifikasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan. Selain itu, dinamika isu lingkungan pada skala global, nasional, dan regional juga menjadi bahan pertimbangan penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program yang dirumuskan adaptif terhadap tantangan masa kini dan masa depan.

Tabel berikut menyajikan rangkuman isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi berdasarkan RPJMD Kabupaten Sigi tahun 2025-2029.

Tabel 2. 8 Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	5	6	7	8
Air bersih melimpah namun belum optimal	Distribusi layanan tidak merata, kualitas buruk	Peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi berbasis desa	Krisis air global dan kelangkaan sumber air	Layanan dasar air dan sanitasi	Akses air bersih terbatas di beberapa kecamatan	Peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi berbasis desa
Wilayah rawan bencana	Minim mitigasi dan adaptasi bencana	Penguatan system mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta tata ruang responsif	Perubahan iklim meningkat kan frekuensi bencana	Ketangguhan dan kesiapsiagaan bencana	Wilayah rawan di Sulawesi Tengah	Penguatan system mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta tata ruang responsif
Tingginya prevalensi stunting	Sanitasi dan gizi buruk, pelayanan tidak merata	Percepatan penurunan stunting dan penguatan system kesehatan dasar	Ketimpangan layanan kesehatan global	Percepatan penurunan stunting	Angka stunting tinggi di desa terpencil	Percepatan penurunan stunting

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sigi merupakan penjabaran dari Misi pembangunan daerah Kabupaten Sigi 2025-2029, yaitu mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta permukiman yang tertata dan bebas dari kawasan kumuh. Tujuan ini selaras dengan arah pembangunan daerah dan mendukung pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sigi. Selain itu juga mendukung terwujudnya Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Harmoni.

Misi I : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkeadilan.

Misi IV : Mewujudkan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Harmoni

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2 *Tujuan dan Sasaran* dibawah.

Tabel 3. 1 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Program
Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Presentase Warga Negara Indonesia yang memperoleh Rumah Layak Huni	Presentase Rumah Tangga Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	Program Pengembangan Perumahan
				Program Kawasan Permukiman
Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Presentase Perumahan yang Memiliki PSU Lengkap	%	Program Peningkatan PSU
Meningkatnya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Presentase Peningkatan Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Presentase Tertib Administrasi Pertanahan	%	Program Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum

				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
				Program Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Misi I Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkeadilan.</i>											
Meningkatkannya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatkan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	85.43	86.28	87.14	88.01	88.89	89.78	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
		Meningkatnya jumlah penerima manfaat Rumah Layak Huni	Persentase Pembangunan Baru dan atau Rehabilitasi serta Relokasi Program Pemerintah untuk Rumah Layak Huni Kabupaten Sigi	%	9.63	10.25	10.75	11.88	12.56	13.18	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Sudah Tertangani tahun Trtentu}}{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Pada Kurun Waktu Tertentu}} \times 100\%$
		Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	%	18.26	20.51	22.76	25.01	27.26	29.51	$\frac{\text{Jumlah Lokasi Baru dengan Prasarana Lengkap}}{\text{jumlah lokasi sebelumnya}} \times 100\%$
<i>Misi IV Mewujudkan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Harmoni</i>											
Meningkatnya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatkan Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya Kualitas layanan administrasi pertanahan	Persentase kualitas layanan Tertib Administrasi Pertanahan	%	49.70	50.20	50.70	51.21	51.72	52.24	$\frac{\text{Presentase luas lahan bersertifikat + Penyelesaian Kasus Tanah Negara + Retribusi Tanah}}{3}$

3.2 Penahapan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

Penahapan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025–2030 disusun dengan mempertimbangkan target tahunan, kemampuan keuangan daerah, dukungan regulatif, serta kesinambungan pembangunan jangka menengah dan panjang. Penahapan ini bertujuan untuk mewujudkan akses perumahan dan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam sasaran RPJMD Kabupaten Sigi 2025–2030.

Secara umum, tujuan penahapan pembangunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030 adalah:

- a. **Mewujudkan kesinambungan pembangunan sektoral** melalui pengaturan skala prioritas tahunan yang realistis dan sesuai kapasitas fiskal daerah;
- b. **Mengoptimalkan capaian sasaran strategis**, terutama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
- c. **Mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program** melalui perencanaan yang terstruktur dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga penyesuaian terhadap dinamika kebijakan;
- d. **Meningkatkan kualitas pengelolaan program berbasis data dan kebutuhan riil/nyata masyarakat**, terutama dalam bidang perumahan dan penataan kawasan permukiman;
- e. **Menjamin sinergi antara pembangunan jangka menengah daerah dan jangka panjang nasional/daerah** (RPJPD dan RPJPN), terutama untuk sektor infrastruktur dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Penahapan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 3.3 di halaman selanjutnya.

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-20230

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Pendataan dan verifikasi RTLH bagi MBR, Korban Bencana maupun Korban Relokasi Program Pemerintah untuk Pemantapan akses dasar permukiman layak huni dan pemenuhan rumah layak huni	Penyaluran bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan baru rumah layak huni, peningkatan kualitas/rehabilitasi rumah tidak layak huni	Perbaikan/Rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan baru rumah korban bencana/relokasi program pemerintah yang belum tertangani.	Penyelesaian pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah yang belum tertangani. Lanjutan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.	Evaluasi Program Pembangunan Baru dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Serta melakukan perencanaan terkait program pengembangan perumahan.
Pendataan kebutuhan PSU pada perumahan eksisting dan perumahan baru	Pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan penerangan jalan pada perumahan relokasi/ bersubsidi	Pembangunan PSU pada perumahan relokasi/ bersubsidi serta berkoordinasi dengan pengembang/ developer	Rehabilitasi PSU yang rusak dan Perluasan layanan PSU di kawasan permukiman padat	Evaluasi kinerja penyediaan PSU 2025–2029, dan Digitalisasi Sistem informasi PSU berbasis GIS
Pendataan, Indetifikasi Lahan Potensial Inventarisasi dan verifikasi lahan milik Pemda dan masyarakat yang potensial untuk perumahan/ permukiman	Melakukan Penyusunan Rencana dan pemetaan terhadap status kepemilikan dan pemanfaatan tanah, serta Pengadaan Tanah di Kabupaten Sigi	Memfasilitasi pengadaan tanah/mediasi penyelesaian status tanah atau penyelesaian sengketa	Penataan Aset dan Zonasi Lahan, Pemutakhiran data aset tanah perumahan serta Penyesuaian zonasi berdasarkan dinamika wilayah Kabupaten Sigi berdasarkan Tata Ruang Wilayahnya	Evaluasi kebijakan pertanahan daerah Kabupaten Sigi

3.3 Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sigi, khususnya Misi I Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkeadilan dan Misi IV Mewujudkan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Harmoni, yang berkaitan dengan Peningkatan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan serta Peningkatan Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi menetapkan strategi pembangunan untuk periode 2025–2030.

Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi disusun untuk menjawab isu strategis dan mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Sigi, yaitu:

- a. Penguatan akses dan keterjangkauan rumah layak huni.
 - 1) Meningkatkan jumlah rumah layak huni melalui program rehabilitasi atau peningkatan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 - 2) Meningkatkan jumlah rumah layak huni melalui program Pembangunan Baru/Rekonstruksi, Rehabilitasi Korban Terdampak Bencana maupun Korban Relokasi Program Pemerintah.
 - 3) Mendorong pembangunan perumahan berbasis masyarakat dan swadaya dengan pendekatan partisipatif.
 - 4) Meningkatkan sinergi dengan instansi vertikal (Kementerian PUPR, Kementerian PKP, dll) untuk mendukung program bantuan perumahan.
- b. Strategi Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.
 - 1) Meningkatkan cakupan dan kualitas akses terhadap air bersih, sanitasi, drainase, dan jalan lingkungan.
 - 2) Penataan kawasan permukiman kumuh dan rawan bencana melalui pendekatan kawasan.
 - 3) Mendorong kolaborasi dengan desa dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dasar.
- c. Strategi Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan
 - 1) Penguatan kelembagaan Dinas dalam tata kelola pembangunan perumahan dan permukiman berbasis perencanaan yang baik.
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM teknis melalui pelatihan dan sertifikasi profesi.
 - 3) Pengembangan regulasi pendukung seperti Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK),

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan pedoman teknis lainnya.

- d. Strategi Inovasi Pembiayaan dan Pemanfaatan Teknologi
 - 1) Pengembangan sistem informasi berbasis digital (Contoh : SIMPerkim Banuata, aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah) untuk mendukung transparansi terkait data RTLH dan Backlog.
 - 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan dan perbaikan rumah.
- e. Strategi Percepatan Integrasi Perencanaan dan Penataan Kawasan
 - 1) Integrasi program perumahan dengan perencanaan wilayah dan tata ruang (RDTR, RP2KPKPK).
 - 2) Pengembangan kawasan strategis permukiman baru yang mendukung pertumbuhan pusat ekonomi (pariwisata dan pertanian).
 - 3) Penataan Kawasan Hunian yang terdampak bencana maupun program relokasi pemerintah.
- f. Tata Kelola Pembangunan kawasan permukiman yang adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim.
 - 1) Mendorong perencanaan dan pembangunan kawasan permukiman berbasis mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, terutama pada wilayah rawan gempa, banjir, dan longsor.
 - 2) Menetapkan zona aman permukiman dalam dokumen tata ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang berbasis kajian risiko.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

Arah kebijakan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2025–2030 mengacu pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Sigi yaitu: “Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkeadilan”

Dalam rangka mendukung pencapaian misi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian layak, kawasan permukiman yang sehat, serta prasarana dan utilitas dasar yang memadai, berbasis lingkungan berkelanjutan dan aksesibilitas layanan dasar.

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi I Tujuan I Sasaran 1.1.2	: Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur secara merata dan keadilan : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Dasar Masyarakat : Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan			
	Meningkatkannya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan rumah layak dan terjangkau melalui pembangunan hunian baru dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni		
		Mendorong penataan kawasan permukiman berbasis lingkungan berkelanjutan dan aksesibilitas layanan dasar.		
Misi IV Tujuan 1 Sasaran 1.1.3	Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Harmoni Sosial Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup Meningkatnya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah			
	Meningkatnya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pengaturan dan Pembagian Tanah yang Adil dan Berkelanjutan: Menyusun kebijakan yang memastikan distribusi tanah yang adil dan transparan, dengan prioritas pada pengakuan hak masyarakat lokal dan adat, serta mendorong penggunaan tanah untuk tujuan yang mendukung kelestarian lingkungan, seperti pertanian berkelanjutan dan kawasan konservasi.		

Untuk mendukung implementasi strategi di atas, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Kebijakan Pengembangan Perumahan:
 - a. Pemberian bantuan Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
 - b. Peningkatan kualitas rumah masyarakat pascabencana.
2. Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman:
 - a. Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh;
 - b. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTLb);
 - c. Menyusun rencana penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk perumahan dan permukiman yang adil dan transparan.
 - d. Mendorong penataan dan pemanfaatan tanah untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan.
3. Kebijakan Penguatan PSU;
 - a. Pembangunan infrastruktur dasar perumahan seperti jalan lingkungan, air bersih, dan sanitasi;
 - b. Penyediaan sarana penampungan air hujan dan pengelolah limbah domestik.
4. Kebijakan Peningkatan Kapasitas dan Regulasi;
 - a. Penguatan regulasi dan pengawasan penyelenggaraan Pembangunan perumahan.
 - b. Pelibatan masyarakat dan kelembangan lokal dalam pengelolaan permukiman.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PRUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan strategis, maka langkah operasional yang telah direncanakan harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi adalah berdasar kepada program-program yang tertuang di dalam dokumen RPD Kab. Sigi, yaitu:

4.1 Program Pengembangan Perumahan.

Program ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau pada lingkungan permukiman melalui penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, sekaligus meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman agar tercipta lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, harmonis dan berkelanjutan.

Program Pengembangan Perumahan sekaligus menjadi indikator pelayanan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi.

4.2 Program Kawasan Permukiman.

Program Kawasan Permukiman bertujuan untuk mengurangi luas Kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.

4.3 Program Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Program Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan kegiatan utamanya Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk di luar lokasi kumuh.

4.4 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program Peningkatan PSU bertujuan tersedianya prasarana dan sarana dan utilitas umum di perumahan dengan kegiatan utamanya peyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

4.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Program ini bertujuan untuk :

- a. Terpenuhinya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
- b. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kerja
- c. Peningkatan kapasitas SDM

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi tahun 2026-2030

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatkan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 2. Meningkatnya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatkan akses hunian Layak terjangkau dan berkelanjutan dan Meningkatkan Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		
					Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)		
		Meningkatnya jumlah penerima manfaat Rumah Layak Huni			Persentase Pembangunan Baru dan atau Rehabilitasi serta Relokasi Program Pemerintah untuk Rumah Layak Huni Kabupaten Sig (%)i		
					Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	1.04.02 – PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)		
					Terdatanya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					umlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen) Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (orang) Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang) Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembuk warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembuk warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	
					Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
					Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
					Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02.0008 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah) Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)		
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.03.0007 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.03.0008 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0010 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)		
					Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)		
					Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)		

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.04.0004 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.04.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.04.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)		

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)		
					Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)		
					Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hunian Vertikal)		
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	1.04.02.2.05.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)	1.04.02.2.05.0003 - Pembangunan Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.05.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	
					Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.05.0007 - Operasional dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hunian Vertikal)	1.04.02.2.05.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	
				Terlaksananya Tertib Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan)		
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)		
					Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana (Orang)		

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi)		
					Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1.04.02.2.06.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana (Orang)	1.04.02.2.06.0002 - Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan)	1.04.02.2.06.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	
					Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi)	1.04.02.2.06.0005 - Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen)	1.04.02.2.06.0006 - Fasilitas Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	
				Terlaksananya Tertib Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) (Laporan)	1.04.02.2.07 - Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) (Laporan)	1.04.02.2.07.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani(%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Terselesaikan Kesepakatan dengan Pengembang/pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)		

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)		
					Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1.04.03.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1.04.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)	1.04.03.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	
				Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)		

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen)		
					Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)		
					Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)		
					Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)		
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen)	1.04.03.2.02.0010 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)	1.04.03.2.02.0011 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
					Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.03.2.02.0013 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.03.2.02.0015 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan) Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit) Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hektar)		
					Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Hektar)		
					Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Hektar)		
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Hektar)		
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
					Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Hektar)	1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)	1.04.03.2.03.0010 - Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Hektar)	1.04.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Hektar)	1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
					Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hektar)	1.04.03.2.03.0014 - Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	
			meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi jumlah kawasan kumuh		Persentase Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang diperbaiki	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan) Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang) Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang) Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga)		
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)		
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.04.2.01.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga)	1.04.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan)	1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang)	1.04.04.2.01.0009 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan			Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		
			Meningkatnya penyediaan PSU perumahan		Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Terlaksananya penyediaan PSU perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)		
					Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)		
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)		

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)		
					Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok)		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok)	1.04.05.2.01.0006 - Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	
					Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01.0009 - Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum		Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Jumlah terlaksananya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi pertanahan			Persentase kualitas layanan Tertib Administrasi Pertanahan (%)		
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan		Persentase kualitas layanan Tertib Administrasi Pertanahan (%)	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
				Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)		
					Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		
					Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.04.2.01.0003 - Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Persentase kualitas layanan Tertib Administrasi Pertanahan (%)	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
				Terselesaikannya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		
					Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan)		
					Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan)		

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah (Laporan)		
					Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan (Laporan)		
					Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan)	2.10.05.2.01.0003 - Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan (Laporan)	2.10.05.2.01.0004 - Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan)	2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah (Laporan)	2.10.05.2.01.0006 - Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.10.05.2.01.0007 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		Persentase kualitas layanan Tertib Administrasi Pertanahan (%)	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
				Terselesaikan Masalah Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)		

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)		
					Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)		
					Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara)		
					Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota (Laporan)		
					Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.06.2.01.0002 - Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	
					Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen)	2.10.06.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.06.2.01.0005 - Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara)	2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	
					Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota (Laporan)	2.10.06.2.01.0007 - Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.06.2.01.0008 - Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	
				Terselesaikan Masalah Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.06.2.02 - Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara		

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Dokumen)		
					Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		
					Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		
					Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.06.2.02.0001 - Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.06.2.02.0002 - Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Dokumen)	2.10.06.2.02.0003 - Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Dokumen)	2.10.06.2.02.0004 - Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Efektifitas Administrasi Kesekretariatan			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan		Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.04.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1.04.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.04.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	2.480.000.000	22,68	4.250.000.000	42,01	4.335.000.000	61,34	4.421.700.000	80,67	4.510.134.000	100	4.600.336.680	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terdatanya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten.Kota		1	245.360.000	1	250.360.000	1	250.360.000	1	250.360.000	1	250.360.000	
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani.	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	0	1	19.360.000	1	19.360.000	1	19.360.000	1	19.360.000	1	19.360.000	
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			83.000.000		83.000.000		83.000.000		83.000.000		83.000.000	
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	0	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	15	3.000.000	15	3.000.000	15	3.000.000	15	3.000.000	15	3.000.000	
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	20	6.000.000	20	6.000.000	20	6.000.000	20	6.000.000	20	6.000.000	
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	0	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	
Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	0	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatkan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		22,68	3.522.000.000	42,01	3.537.000.000	61,34	3.623.700.000	80,67	3.662.134.000	100	3.752.336.680	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	0	10	206.525.666	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	S21	121	2.933.474.334	121	3.055.000.000	121	3.141.700.000	121	3.180.134.000	121	3.270.336.680	
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	11	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	121	10.000.000	121	10.000.000	121	10.000.000	121	10.000.000	121	10.000.000	
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	0	121	5.000.000	121	5.000.000	121	5.000.000	121	5.000.000	121	5.000.000	
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			223.000.000		223.000.000		223.000.000		223.000.000		223.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
Operasional dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Tertib Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			144.640.000		209.640.000		209.640.000		259.640.000		259.640.000	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	0	1	1.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0	1	139.640.000	1	139.640.000	1	139.640.000	1	139.640.000	1	139.640.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/ Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	0	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	
Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Terlaksananya Tertib Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)			15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Kawasan permukiman	1.360.000.000		1.387.200.000		1.414.944.000		1.443.242.880		1.472.107.737,60		1.501.549.892,35	
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terselesaikan Kesepakatan dengan Pengembang/pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik			45.900.000		46.818.000		47.754.360		48.709.447		49.683.636	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	0	1	15.300.000	1	15.606.000	1	15.918.120	1	16.236.482	1	16.561.212	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasidan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	0	1	15.300.000	1	15.606.000	1	15.918.120	1	16.236.482	1	16.561.212	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	0	1	15.300.000	1	15.606.000	1	15.918.120	1	16.236.482	1	16.561.212	
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			107.100.000		109.242.000		111.426.840		113.655.377		115.928.484	
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	0	1	10.2000.000	1	10.404.000	1	10.612.080	1	10.824.322	1	11.040.808	
Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakatdi Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat diKawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	53	54	15.300.000	55	15.606.000	56	15.918.120	57	16.236.482	58	16.5612.212	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	53	54	20.400.000	55	20.808.000	56	21.224.160	57	21.648.643	58	22.081.616	
Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	0	1	10.2000.000	1	10.404.000	1	10.612.080	1	10.824.322	1	11.040.808	
Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/ Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/ Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	53	54	15.300.000	55	15.606.000	56	15.918.120	57	16.236.482	58	16.5612.212	
Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	0	1	15.300.000	1	15.606.000	1	15.918.120	1	16.236.482	1	16.5612.212	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0	1	20.400.000	1	20.808.000	1	21.224.160	1	21.648.643	1	22.081.616	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	6,91	7,42	1.080.000.000	8,02	1.100.000.000	8,72	1.120.000.000	9,55	1.140.000.000	10,55	1.160.000.000	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	53	54	21.600.000	55	23.632.000	56	26.104.640	57	29.026.733	58	32.407.267	
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	0	1	21.600.000	1	23.632.000	1	26.104.640	1	29.026.733	1	32.407.267	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasidan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	0	1	15.300.000	1	15.606.000	1	15.918.120	1	16.236.482	1	16.5612.212	
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	2	1	20.400.000	55	20.808.000	56	21.224.160	57	21.648.643	58	22.081.616	
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	0	1	15.300.000	1	15.606.000	1	15.918.120	1	16.236.482	1	16.5612.212	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0	1	15.300.000	1	15.606.000	1	15.918.120	1	16.236.482	1	16.5612.212	
Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	0	1	15.300.000	1	15.606.000	1	15.918.120	1	16.236.482	1	16.5612.212	
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0	1	20.400.000	55	20.808.000	56	21.224.160	57	21.648.643	58	22.081.616	
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0	1	15.300.000	1	15.606.000	1	15.918.120	1	16.236.482	1	16.5612.212	
Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	0	1	15.300.000	1	15.606.000	1	15.918.120	1	16.236.482	1	16.5612.212	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatkannya kualitas hidup masyarakat dan mengurangi jumlah kawasan kumuh	0		300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	0	20	300.000.000	40	306.000.000	60	312.120.000	80	318.362.400	100	324.729.648	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	0	50	80.000.000	51	81.600.000	52	83.232.000	53	84.896.640	54	86.594.573	
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	0	50	80.000.000	51	81.600.000	52	83.232.000	53	84.896.640	54	86.594.573	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penatausahaan SerahTerima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	0	50	40.000.000	51	40.800.000	52	41.616.000	53	42.448.320	54	43.297.286	
Pelaksanaan Pembagian RumahBaruLayakHunibagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya PermukimanKumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	0	50	30.000.000	51	30.600.000	52	31.212.000	53	31.836.240	54	32.472.965	
Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	0	1	30.000.000	1	30.600.000	1	31.212.000	1	31.836.240	1	32.472.965	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti PenyadaranPublik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	0	50	20.000.000	51	20.400.000	52	20.808.000	53	21.224.160	54	21.648.643	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	0	50	20.000.000	51	20.400.000	52	20.808.000	53	21.224.160	54	21.648.643	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	0		250.000.000		255.000.000		260.100.000		265.302.000		270.608.040	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas layanan Tertib Administrasi Pertanahan	0	50.20	250.000.000	50.70	255.000.000	51.21	260.100.000	51.72	265.302.000	52.24	270.608.040	
Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	4	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	4	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	
Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	4	70.000.000	3	75.000.000	3	80.100.000	3	85.302.000	3	90.608.040	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	0		250.000.000		255.000.000		260.100.000		265.302.000		270.608.040	
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas layanan Tertib Administrasi Pertanahan	0	50.20	250.000.000	50.70	255.000.000	51.21	260.100.000	51.72	265.302.000	52.24	270.608.040	
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	0	4	5.000.000	3	10.000.000	3	15.100.000	3	20.302.000	3	25.608.040	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	4	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	
Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	0	4	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	
Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	0	4	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	
Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	0	4	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	
Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	0	4	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	4	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0		250.000.000		255.000.000		260.100.000		265.302.000		270.608.040	
2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas layanan Tertib Administrasi Pertanahan	0	50.20	175.000.000	50.70	175.000.000	51.21	175.000.000	51.72	175.000.000	52.24	175.000.000	
2.10.06.2.01.0002 - Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	4	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
2.10.06.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen)	0	4	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	
2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	4	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	
2.10.06.2.01.0005 - Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara)	0	4	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	
2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara)	0	4	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
2.10.06.2.01.0007 - Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota (Laporan)	0	4	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	
2.10.06.2.01.0008 - Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	4	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	
2.10.06.2.02 - Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas layanan Tertib Administrasi Pertanahan	0	50.20	75.000.000	50.70	80.000.000	51.21	85.100.000	51.72	90.302.000	52.24	95.608.040	
2.10.06.2.02.0001 - Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	4	25.000.000	3	30.000.000	3	35.100.000	3	40.302.000	3	45.608.040	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
2.10.06.2.02.0002 - Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	4	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	
2.10.06.2.02.0003 - Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Dokumen)	0	4	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	
2.10.06.2.02.0004 - Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Dokumen)	0	4	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	1.870.000.000		1.907.400.000		1.945.548.000		1.984.458.960		2.024.148.139,20		2.064.631.101,98	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyediaan PSU Perumahan	18,34	18.54	1.907.400.000	18.73	1.945.548.000	18.92	1.984.458.960	19.11	2.024.148.139,20	19.30	2.064.631.101,98	
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	1	200.277.000	1	204.282.540	1	208.368.191	1	212.535.555	1	216.786.266	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	1	28.611.000	1	29.183.220	1	29.766.884	1	30.362.222	1	30.969.467	
Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	1	1	22.888.800	1	23.346.576	1	23.813.508	1	24.289.778	1	24.755.573	
Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1	1	49.592.400	1	50.584.248	1	51.595.933	1	52.627.852	1	53.680.409	
Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	1	1	9.537.000	1	9.727.740	1	9.922.295	1	10.120.741	1	10.323.156	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1	1	70.573.800	1	71.985.276	1	73.424.981	1	74.893.480	1	76.391.350	
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1	1	381.480.000	1	389.109.600	1	396.891.792	1	404.829.628	1	412.926.220	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1	1	1.144.440.000	1	1.167.328.800	1	1.190.675.376	1	1.214.488.883	1	1.238.778.661	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAREGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum	0		300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Meningkatnya Orang atau Badan Hukum yang Bersertifikasi dan Teregistrasi dalam Pelaksanaan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	1.77	3.48	300.000.000	5.12	306.000.000	6.45	312.120.000	7.93	318.362.400	9,37	324.729.648	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1	1	300.000.000	1	306.000.000	1	312.120.000	1	318.362.400	1	324.729.648	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	100	100	2.982.620.000		3.042.272.400	100	3.103.117.848	100	3.165.180.205	100	3.228.483.809	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	119.982.151	100	162.319.551	100	214.482.099	100	263.527.356	100	271.341.960	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	6.000.000	3	6.500.000	3	7.000.000	3	7.000.000	3	8.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	6.000.000	1	6.5000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	6.000.000	2	6.5000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	5.500.000	1	6.5000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	5.500.000	2	6.500.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	5.500.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	65.482.151	1	92.319.551	1	140.482.099	1	189.527.356	1	189.341.960	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	9.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	5.500.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	2.241.214.849	100	2.214.214.849	100	2.214.214.849	100	2.214.214.849	100	2.214.214.849	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	23	2.004.734.849	23	2.004.734.849	23	2.004.734.849	23	2.004.734.849	23	2.004.734.849	
Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	171.240.000	12	171.240.000	12	171.240.000	12	171.240.000	12	171.240.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5.570.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0	1	5.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	43.440.000	100	67.440.000	100	67.440.000	100	67.440.000	100	67.440.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	37.440.000	1	61.440.000	1	61.440.000	1	61.440.000	1	61.440.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	81.727.000	100	107.855.000	100	113.855.000	100	113.855.000	100	113.855.000	
PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1	4.303.000	1	4.303.000	1	4.303.000	1	4.303.000	1	4.303.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1	1	4.392.000	1	4.392.000	1	4.392.000	1	4.392.000	1	4.392.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	0	1	15.000.000	1	17.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	5	46.732.000	3	70.360.000	3	70.360.000	3	70.360.000	3	90.360.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1	5.500.000	1	5.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	63.789.000	100	25.800.000	100	28.482.900	100	41.500.000	100	76.989.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1	6.800.000	1	6.800.000	1	6.982.900	1	20.000.000	1	20.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	3	55.489.000	1	17.500.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	55.489.000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Tersedianya Aset Tetap Lainnya	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	101.053.000	100	103.789.000	100	103.789.000	100	103.789.000	100	103.789.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	5.553.000	1	8.289.000	1	8.289.000	1	8.289.000	1	8.289.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	48.000.000	12	48.000.000	12	48.000.000	12	48.000.000	12	48.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Disediakan	12	12	47.000.000	12	47.000.000	12	47.000.000	12	47.000.000	12	47.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	362.404.000	100	363.094.000	100	363.094.000	100	363.094.000	100	363.094.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	16	352.444.000	16	352.444.000	16	352.444.000	16	352.444.000	16	352.444.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	26	9.460.000	26	10.150.000	26	10.150.000	26	10.150.000	26	10.150.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	

Tabel 4. 3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi tahun 2026-2030

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
2	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.02.0010 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) H	
			1.04.03.2.02.0011 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
			1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
3	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi jumlah kawasan kumuh	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
			1.04.04.2.01.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	
			1.04.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	
4	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah	
			2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	
6	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
			1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
7	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum	1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	
			1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi tahun 2026-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman									
2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	0	85,43	86,28	87,14	88,01	88,89	89,78	
3	Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	49,21	49,70	50,20	50,70	51,21	51,72	52,24	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

No.	Indikator	Status	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Positif	%	0	85,43	86,28	87,14	88,01	88,89	89,78	
3	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Positif	%	0	18,26	20,51	22,76	25,01	27,26	29,51	
4	Persentase Pembangunan Baru dan atau Rehabilitasi serta Relokasi Program Pemerintah untuk Rumah Layak Huni Kabupaten Sig	Positif	%	0	9,63	10,25	10,75	11,88	12,56	13,18	
5	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
6	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Positif	%	49,21	49,70	50,20	50,70	51,21	51,72	52,24	
7	Persentase kualitas layanan Tertib Administrasi Pertanahan	Positif	%	23,82	24,06	24,30	24,54	24,79	25,04	25,29	

BAB V PENUTUP

Keberhasilan kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi bukanlah diukur dari realisasi fisik dan keuangan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan, namun keberhasilan haruslah mampu membuktikan bahwa kinerja yang dilakukan dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian target Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tahun 2025-2029 sangat memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini tugas pemerintah Kabupaten Sigi adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif, mengurangi risiko investasi, mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi. Berbagai insentif untuk menarik investasi dapat dilakukan terkait kelayakan proyek dan pembiayaan melalui penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) berupa pemberian dukungan Pemerintah, seperti pembebasan tanah atau pembangunan yang sebagian dibangun oleh Pemerintah.

Melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 secara konsisten serta Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat dalam penyelenggaraan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sangat diperlukan. Akhir kata, Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 perlu untuk dijabarkan ke dalam rencana program dan rencana kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman secara konsisten guna mewujudkan Visi Kabupaten Sigi yaitu **"Kabupaten Sigi, Maju Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata"**.

Sigi, 30 September 2025

Mengetahui

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**



AMRIN, S.T., M.I
Nip. 197309222002121003